

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dari sistem pemberian kredit di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Karang Besuki secara prosedur yang telah dibuatkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebenarnya sudah sangat baik, namun pada kenyataannya program pinjaman bergulir masih cukup bermasalah. Masalah paling utama yaitu bagaimana tingkat pengembalian angsuran yang terjadi masih sangat rendah, terbukti dari tabel tingkat kolektibilitas hampir seluruh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) menunggak angsuran bahkan beberapa kelompok tingkat kolektibilitasnya mencapai kolektibilitas 5. Jika dilihat dari tabel 4.3 bahkan dari tahun 2012 ke 2013 tingkat kolektibilitas jumlahnya naik hingga mencapai 53%.

Besarnya jumlah kolektibilitas yang sangat berpengaruh untuk prosentase LAR, PAR serta ROI. Perlu diketahui bahwa prosentase LAR, PAR, ROI adalah tingkat prosentase keberhasilan dari program pinjaman bergulir yang telah dijalankan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Menurut hasil perhitungan LAR, PAR serta ROI untuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Karang Besuki sebagai berikut:

	2012	2013
LAR	40%	42,8%
PAR	35%	21,7%
ROI	0,19%	-0,9%

Dari prosentase tersebut dapat terlihat bahwa prosentase LAR mengalami peningkatan dan PAR mengalami penurunan sedangkan prosentase ROI masih sangat rendah ini artinya bahwa program pinjaman bergulir yang telah dijalankan oleh BKM Karang Besuki masih memiliki masalah, masalah yang terjadi yaitu tingkat pengembalian dari KSM masih cukup rendah. Hal ini dapat menyebabkan tidak kembalinya uang pinjaman atau terjadi kredit macet.

5.2. Saran

Untuk mengatasi masalah yang ada di BKM Karang Besuki yakni tingkat pengembalian angsuran yang rendah, maka penulis memberikan rekomendasi dengan tujuan agar tingkat pengembalian angsuran menjadi lebih baik, serta tingkat kolektibilitas yang terjadi semakin berkurang bahkan tidak ada kolektibilitas sama sekali. Rekomendasi yang pertama yaitu pengevaluasian terhadap tahap verifikasi. Tahap verifikasi ini adalah proses awal dari proses pemberian pinjaman kredit maka hendaknya verifikasi yang dilakukan dilaksanakan atau dijalankan dengan benar. Kedua adalah pembinaan pinjaman bergulir. Tahap pembinaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pinjaman dan mengingatkan peminjam akan kewajiban dalam melakukan pembayaran pinjaman. Pihak BKM hendaknya mengikut

sertakan atau melibatkan pihak desa/kelurahan dalam membina anggota KSM sehingga tujuan dari tahap ini tercapai.

Ketiga adalah pemberian sanksi kepada KSM melalui desa/kelurahan. Desa/kelurahan akan diberikan sanksi desa/kelurahan tempat asal KSM tersebut tidak dapat mengajukan proposal untuk pembuatan infrastruktur ke PNPM Mandiri apabila ada KSM yang berada di desa/kelurahan tersebut tidak dapat mengembalikan angsuran. Dengan sanksi semacam ini pihak desa/kelurahan akan melibatkan diri agar KSM tersebut mampu mengembalikan angsuran pinjamannya. Keempat adalah penagihan melalui aparat desa/kelurahan. Pihak PNPM Mandiri dapat melakukan penagihan melalui aparat desa/kelurahan dengan cara pihak PNPM Mandiri tidak akan memberikan surat atau dokumen yang diperlukan oleh desa/kelurahan yang berada di PNPM Mandiri apabila masih ada KSM yang berada di desa/kelurahan tersebut mengalami tunggakan angsuran. Hal ini dapat membuat pihak desa/kelurahan harus melibatkan diri untuk membantu KSM dalam melunasi tunggakannya. Kelima adalah peningkatan honor karyawan peningkatan honor ini bertujuan agar petugas yang bertugas untuk memverifikasi usulan dari KSM dapat memverifikasi dengan benar. Keenam yaitu pembekalan pelaku verifikasi, sebenarnya PNPM Mandiri telah melakukan pembekalan ini melalui fasilitatornya namun secara praktik masih ada pelaku yang belum memahami secara benar tugas serta tanggung jawabnya. Maka PNPM Mandiri dalam melakukan pembekalan dapat

memastikan apakah pelaku verifikasi tersebut telah memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan benar.

